

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN EMINENT PERSONS GROUP INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk mendukung aktifitas Eminent Persons Group Republik Indonesia - Malaysia dan menyiapkan pertemuan Eminent Persons Group Indonesia - Malaysia di Indonesia, maka perlu menetapkan pembentukan Eminent Persons Group Indonesia dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN EMINENT PERSONS GROUP INDONESIA

Pasal 1

- (1) Dalam upaya lebih mempererat persaudaraan dan hubungan kerja sama antara Indonesia - Malaysia dibentuk Eminent Persons Group Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut EPG Indonesia.
- (2) EPG Indonesia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

EPG Indonesia bertugas untuk :

- a. melakukan pengkajian dan penilaian terhadap isu-isu yang mengganggu hubungan Indonesia - Malaysia;
- b. melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan bilateral yang lebih erat dan saling menguntungkan antara kedua negara di segala bidang;
- c. memperkuat people-to-people contact diantara kedua negara;
- d. membina kesepahaman dan saling pengertian di berbagai bidang dan lapisan masyarakat diantara kedua negara;
- e. merumuskan rekomendasi kepada Presiden Indonesia tentang persoalan yang muncul dengan menggali akar masalah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, EPG Indonesia berkoordinasi dan dapat mengikutsertakan Pimpinan Instansi Pemerintah terkait dan atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Susunan keanggotaan EPG Indonesia terdiri dari:

- a. Ketua : Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno
- b. Anggota :
 - 1. Ali Alatas, S.H;
 - 2. Prof. Dr. Quraish Shihab MA.;
 - 3. Drs. Des Alwi Abu Bakar;
 - 4. Dr. Musni Umar, S.H., M.S.;
 - 5. Dr. Pudanita Purenti, MP.SS.;
 - 6. Wahyuni Bakar, S.H..

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas EPG Indonesia dibentuk Sekretariat EPG Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada EPG Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat EPG Indonesia diatur oleh Ketua EPG Indonesia.

Pasal 6

EPG Indonesia melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas EPG Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua EPG Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO